

BAB I

PENDAHULUAN

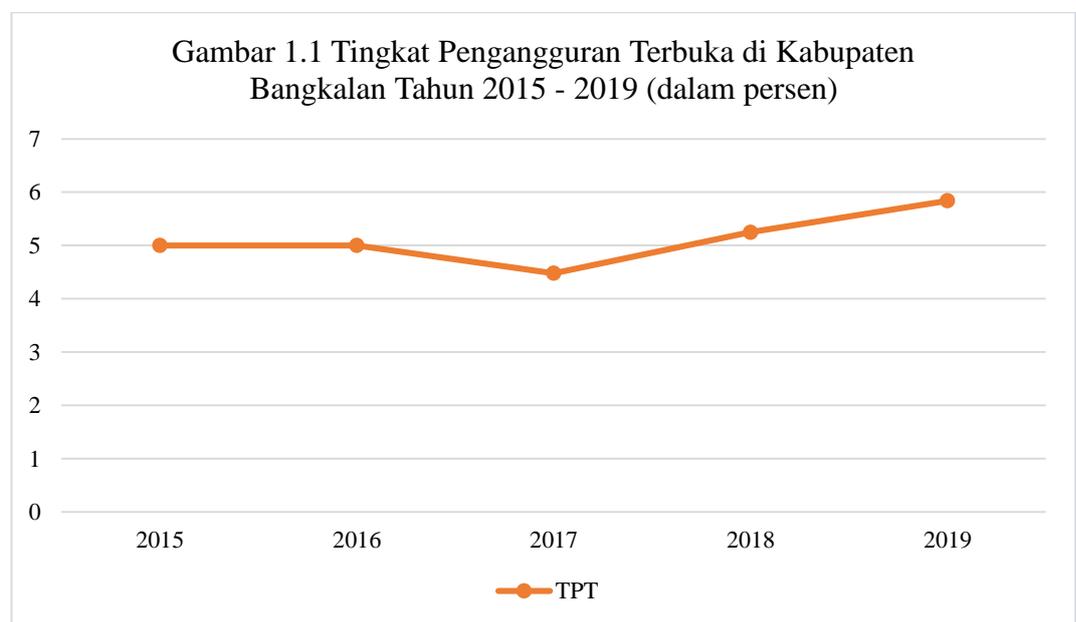
1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi dan memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga layak untuk disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam upaya peningkatan perekonomian negara. Namun pada kenyataannya sekarang, banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau dengan kata lain menjadi pengangguran. Secara ekonomi makro, pengangguran masih menjadi permasalahan pokok yang belum teratasi secara maksimal oleh pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kabupaten Bangkalan adalah bagian dari Provinsi Jawa Timur yang berada di ujung barat Pulau Madura. Melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965, Bangkalan didirikan menjadi sebuah kabupaten. Kabupaten Bangkalan secara administratif terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan, 273 desa dan 8 kelurahan.

Pembangunan ekonomi adalah sebuah usaha untuk meningkatkan taraf hidup di suatu daerah dapat diukur melalui tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah adalah dapat dilihat dari persentase dari tingkat pengangguran. Distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat di

suatu daerah dapat dilihat melalui tingkat penganggurannya. Pengangguran di suatu daerah dapat terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja yang mencari pekerjaan namun tidak diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja. Gambaran tentang perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.1.



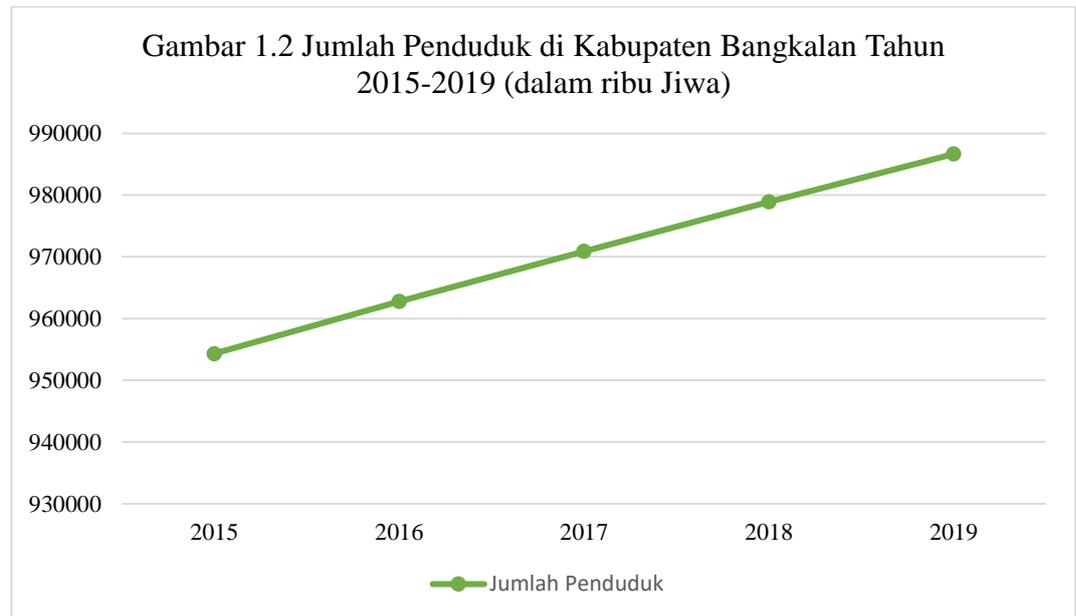
Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah), 2019

Jika dilihat dari Gambar 1.1 dengan menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangkalan, dimana pada tahun 2015-2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 sampai 2016, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangkalan sebesar 5 persen. Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangkalan mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 4,48. Namun pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan yang

signifikan yakni 5,25 persen menjadi 5,84 persen. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bangkalan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk menekan angka pengangguran yang terjadi setiap tahunnya.

Berdasarkan tingkat pengangguran di suatu daerah dapat dilihat bagaimana kondisi perekonomian suatu daerah. Apakah perekonomian di daerah tersebut mengalami perkembangan, bertumbuh secara lambat atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu, melalui tingkat pengangguran dapat dilihat ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu daerah tersebut.

Peningkatan jumlah pengangguran di Kabupaten Bangkalan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pengangguran adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terjadi tiap tahunnya akan mempengaruhi pula jumlah angkatan kerja. Setiap penambahan angkatan kerja tidak terserap ke dalam lapangan kerja akan mengakibatkan peningkatan yang terjadi pada tingkat pengangguran. Gambaran tentang perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.2.



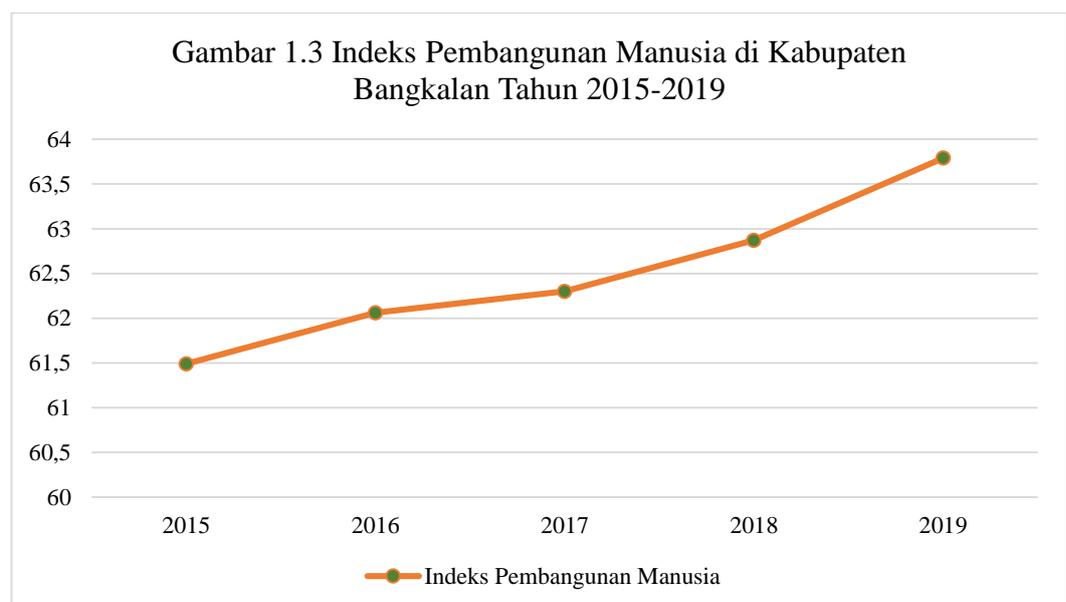
Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah), 2019

Berdasarkan Gambar 1.2 Dengan menggunakan data Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan, dimana jumlah penduduk pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Jumlah Penduduk Kabupaten Bangkalan sebanyak 954.305 jiwa merupakan angka jumlah penduduk terendah, dan pada tahun 2019 Jumlah Penduduk di Kabupaten sebanyak 986.672 jiwa merupakan angka jumlah penduduk tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa angka Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangkalan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Untuk dapat menilai kinerja suatu perekonomian daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah. Perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah produksi barang dan jasa mengalami terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian, melalui pertumbuhan

ekonomi dapat diketahui sejauh mana produktivitas suatu daerah dalam menjalankan aktivitas perekonomian yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu (Kembar, 2010). Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka akan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di suatu daerah tersebut berkembang dengan baik.

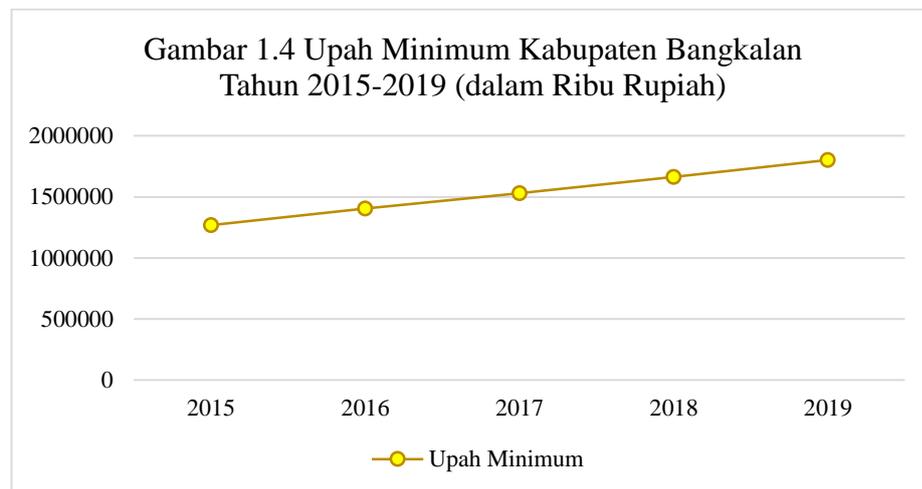
Salah satu tolak ukur bagi suatu daerah untuk melihat seberapa tinggi tingkat pembangunan manusia adalah melihat Indeks pembangunan manusia. The United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai pilihan untuk manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan penghasilan serta pekerjaan. Gambaran tentang perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.3.



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah), 2019

Berdasarkan Gambar 1.3 dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan, dimana pada tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan sebesar 61,49 mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2019 angka Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,79. Hal ini menunjukkan bahwa persentase Indeks Pembangunan Manusia selama lima tahun terakhir cenderung menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran adalah Upah Minimum. Upah Minimum Kota/Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upah Minimum Kabupaten terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Gambaran tentang perkembangan Upah Minimum Kabupaten Bangkalan pada tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.4.



Sumber : BPS Jawa Timur (data diolah), 2019

Berdasarkan Gambar 1.4 dengan menggunakan data Upah Minimum Kabupaten Bangkalan, dimana pada tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam menentukan nilai upah minimum yang akan diterima oleh para pekerja, tentunya menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah. Apabila nilai upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah mengalami kenaikan, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja. Namun permintaan terhadap tenaga kerja tersebut menurun karena pengusaha tidak mampu memberikan upah yang tinggi sehingga akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan (Sa'adah & Ardyan, 2016).

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan upah minimum. Kebijakan ini tentu menguntungkan bagi para buruh karena mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian buruh diharapkan juga mampu bekerja lebih giat lagi karena mereka telah mendapatkan gaji yang layak sesuai dengan standar kebutuhan pekerja. Namun jika dilihat dari sisi pengusaha, mereka akan merasa keberatan dengan kebijakan kenaikan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan kenaikan upah minimum pengusaha akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan sehingga untuk memaksimalkan laba, pengusaha akan meminimumkan penggunaan tenaga kerjanya. Hal ini tentu mendorong meningkatnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan

Manusia dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, dapat dituliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan?
3. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan?
4. Apakah Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum berpengaruh secara bersama-sama terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengangguran.
3. Untuk menganalisis pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran.
4. Untuk menganalisis Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pengangguran

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada besarnya tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan yang dipengaruhi oleh tingginya jumlah penduduk, tingkat upah minimum dan Indeks Pembangunan Manusia yang terjadi dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas yakni Jumlah Penduduk di Kabupaten Bangkalan, Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bangkalan dan Tingkat Upah Minimum Kabupaten Bangkalan.

1.5 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan :

1. Mampu memberikan wawasan pengetahuan mengenai Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan, bagi peneliti sendiri (khususnya) dan bagi peneliti selanjutnya (umumnya).
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut dalam aspek yang sama maupun aspek yang berhubungan.
3. Bagi penulis sendiri, untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama proses perkuliahan.

Adapun manfaat praktis yang ingin diambil dari penelitian ini adalah :

Diharapkan dapat memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan pada pemerintah sebagai perencanaan pembangunan dan kebijakan strategis khususnya di bidang pemerintahan Kabupaten Bangkalan.